



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 115 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 90 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN CISEWU TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 90 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cisewu Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 90 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cisewu Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 90 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cisewu Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 90);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 90 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN CISEWU TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 90 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cisewu Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 90) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 115

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 115 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 90
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
KERJA KECAMATAN CISEWU
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping juga karena adanya pengaruh globalisasi. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam percepatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur serta penguatan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah berapa kali, dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2022 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dalam rangka mewujudkan **Visi** Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta **Misi** ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah Disertai Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih”**, dalam menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Cisewu Kabupaten Gaut Tahun 2019–2024, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping juga karena adanya pengaruh globalisasi. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam **Percepatan Ekonomi dan**

Pembangunan Infrastruktur Serta Penguatan Pelayanan Public untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legilemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelegaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah

sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Government) dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut menyusun Dokumen Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2023 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan.

Dalam menyusun Dokumen Rencana Kinerja Perubahan Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Cisewu Kabupaten Gaut Tahun 2019–2024, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Renja Perubahan Kecamatan Cisewu Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2022 dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Proses penyusunan Renja dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Recana Kerja Perubahan Kecamatan Cisewu Tahun 2023 juga berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya. bahwa Renja Kecamatan Cisewu merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan dalam Rencana Kerja harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat kerja daerah, Rencana Kerja diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat spesifik (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), sesuai atau relevan (*Relevant*), dan tepat waktu (*Time-bond*). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. Renja Kecamatan Cisewu Tahun 2023 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Garut menghadapi tantangan dalam penanganan pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, penyebaran pandemi COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia, dan hingga saat ini masih terdapat tanda-tanda penyebarannya. Pandemi COVID-19 tahun 2023 sudah terkendali pada level yang rendah, diharapkan mulai bisa lepas dari tekanan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Garut Tahun 2022 difokuskan pada upaya promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanggulangan pandemi COVID-19 secara komprehensif. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 memuat pula gambaran umum, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (*new normal*) pasca COVID-19.

Pandemi COVID-19 telah memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya mencegah lonjakan kasus di masa depan. Masa epidemi saat ini telah membawa perubahan besar pada semua aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan teknologi. Epidemi bukan hanya ujian, tetapi juga peluang baru. Asumsi yang digunakan dalam pembangunan daerah tahun 2023 yaitu :

- a. Masyarakat diharapkan sudah dapat hidup berdampingan dengan COVID-19 seiring dengan adanya vaksin, serta terbentuknya *herd-immunity*.

- b. Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli.
- c. Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optimal, serta upaya pemulihan ekonomi nasional sudah berjalan dengan baik, termasuk sudah kembali berjalannya proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
- d. Seluruh aktivitas masyarakat sudah berjalan normal namun tetap menerapkan protokol kesehatan pada semua lini (*new normal*).

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu “**Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**”, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”. Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengemban tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan pelimpahan delegasi tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
8. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
9. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
10. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

11. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
12. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
13. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
14. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

Selanjutnya berdasarkan Rencana Strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Cisewu tahun 2023.

1.1 Landasan Hukum

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
31. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Cisewu Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Sebagai arah dan pedoman taktis dan strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi kecamatan dalam pembangunan daerah.
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang akuntabel, partisipatif dan tepat sasaran.
4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdayaguna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi kecamatan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Cisewu Tahun 2023 adalah untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat diterjemahkan ke dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.4. Sistematika Penulisan.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Hasil Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Cisewu merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk priode 1 (satu) Tahun yang meliputi penjabaran perencanaan penganggaran tahunan dan rencana strategis Kecamatan Cisewu tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara priodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cisewu ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kineja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Cisewu selama tahun 2022 dan tahun berjalan 2023 serta perkiraan target anggaran tahun 2024.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Cisewu tahun berjalan 2023 yaitu dengan melaksanakan 6 program dan 15 Kegiatan dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp.4.499.810.055; yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut dengan rincian sebagai berikut :

Adapun Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan triwulan II dan Capaian Renstra Kecamatan Cisewu adalah sebagai berikut:

Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari total anggaran sebesar Rp. 3.949.816.355,- realisasi sebesar Rp. 790.426.202,- atau 20,01%.

- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dari total anggaran sebesar Rp. 95.244.100,- realisasi sebesar Rp. 1.614.000,- atau 1,69%.
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dari total anggaran sebesar Rp. 72.198.900,- realisasi sebesar Rp. 55.836.200,- atau 77,34%.
- 4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dari total anggaran sebesar Rp. 186.822.900,- realisasi sebesar Rp. 119.851.950,- atau 64,15%.
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dari total anggaran sebesar Rp. 160.087.600,- realisasi sebesar Rp. 70.841.550,- atau 44,25%.
- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dari total anggaran sebesar Rp 35.640.200; realisasi sebesar Rp. 24.330.000,- atau 68,27%.

Kegiatan yang dilaksanakan SKPD Kecamatan Cisewu Pada Tahun 2023, terdiri dari 15 (Lima belas) kegiatan, realisasi kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (38,9%)
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (40,7%)
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (35,6%)
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (52%)
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (0%)
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (32%)
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (60,6%)
- 8) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (0%)

- 9) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (54,7%)
- 10) Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa (64,1%)
- 11) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (0%)
- 12) Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) (96%)
- 13) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (65%)
- 14) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (57,3%)
- 12) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (44,3%)
- 13) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (68,3%).

Untuk lebih jelasnya Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Realisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada SKPD Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut Tahun 2023 Triwulan II

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	UNSUR KEWILAYAHAN	4,499,810,055	1,062,899,902	23,62%
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,949,816,355	790,426,202	20,01%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.892.300	12,784,100	38,9%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,893,500	7,296,000	34,9%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1,999,800	1,987,800	99,4%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1,999,800	0	

4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1,999,800	1,690,000	84,5%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1,999,800	0	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	1,999,800	0	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,999,800	1,810,300	90,5%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,662,657,255	676,285,702	40,7%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,653,301,455	670,443,802	40,6%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9,355,800	5,841,900	62,4%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32,840,200	11,693,200	36%
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17,840,200	11,693,200	65,5%
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15,000,000	0	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	127,140,900	66,053,200	52%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,500,000	5,887,000	56,1%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55,363,000	27,678,500	50%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,000,000	3,500,000	50%
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,960,200	6,940,000	53,5
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40,320,000	21,050,000	52,2%
6	Penatausahaan Arsif Dinamis pada SKPD	997,700	997,700	100%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,037,476,000		0%
1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,000,000,000	0	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37,476,000	0	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38,089,700	12,269,800	32%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9,300,000	3,875,000	41,7%
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7,790,000	3,895,000	50%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20,999,700	4,499,800	21,4

7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18,720,000	11,350,200	60,6%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18,720,000	11,350,200	60,6%
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Belanja modal)			
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	95,244,100	1,614,000	1,6%
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	74,803,900	0	7,9%
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	74,803,900	0	
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	20,440,200	1,614,000	7,9%
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20,440,200	1,614,000	7,9%
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	72,198,900	50,486,200	69,93%
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	42,198,900	27,037,200	64%
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14,508,000	12,944,000	89.2%
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27,690,900	14,093,200	50.9%
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			
3	Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)	30,000,000	28,799,000	96%
1	Penanganan Covid-19 disetiap Desa dan Kelurahan	30,000,000	28,799,000	96%
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	186,822,900	119,851,950	64,2%
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	166,398,600	108,147,850	65 %
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	116,398,500	58,150,250	50%
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh		49,997,600	100%

	Masyarakat	50,000,100		
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20,424,300	11,704,100	57,3%
1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20,424,300	11,704,100	57,3%
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	160,087,600	70,841,550	44,3%
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	160,087,600	70,841,550	44,3%
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	14,030,200	3,000,000	21,4%
2	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	146,057,400	67,841,550	46,4%
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	35,640,200	24,330,000	68,27%
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35,640,200	24,330,000	68,27%
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12,570,000	6,498,000	51,7%
2	Jumlah Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	7,811,000	3,658,800	46,8%
3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15,259,200	14,173,200	92,9%
Jumlah		4,499,810,055	1,062,899,902	24%

Sumber Data : Laporan realisasi Triwulan II

Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Dari 6 (enam) program dan 15 (Lima belas) Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Cisewu Pada Tahun 2023 sampai Triwulan II dari Total Anggaran Rp 4.499.810.055 , realisasi Rp 1,062,899,902; atau (24%) jadi belum ada Program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan yaitu:

- a. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan baru sampai triwulan II
 - 2) Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
 - 3) Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan.
- b. Faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, Sub Kegiatan adalah dikarenakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cisewu adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cisewu Pada Tahun 2023 (TW II) berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Cisewu pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan SKPD Kecamatan.

Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Cisewu selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada table 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2023

Kecamatan Cisewu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
7					Urusan Wajib									
7	01				Bidang Urusan Pemerintahan									
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	84.76 %	100%	94.95	0,42	100%	19%	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	98.54%	100%	99.73	0,47	100%	47,8	41,6%
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	16,0%	100%	99.73	0,47	100%	47,8	39,4%
7	01	01	2.02	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD								
7	01	01	2.03	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD								
7	01	01	2.04	03	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD								
7	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD								
7	01	01	2.06	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan								

				SKPD	Ikhtisar Kinerja SKPD									
7	01	01	2.07	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capihan Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD									
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	100%	0%	100%	0	0,45	100%	0	36,7%
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	92.28%	100%	95.92	0,45	100%	45,3	38,5%
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100%	92.28%	100%	95.88	0,45	100%	45,2	43,3%
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD dan Hasil Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	94.42,%	100%	99.85	0,50	100%	50,0	94%
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	93.40 %	100%	100.00	0,39	100%	39,0	37,2%
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	93.40%	100%	100.00	0,39	100%	39,0	37,2%
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	0%	100%	0	100%	100%	0	0%
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	98.88%	100%	100.00	0,59	100%		46,8%
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang di Sediakan Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100.00	1	100%		160%
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang di Sediakan Sesuai Kebutuhan	100%	98.92%	100%	100.00	0,75	100%		46,9
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100.00	1	100%		179%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan yang di Sediakan sesuai kebutuhan	100%	91.41%	100%	100.00	0,33	100%		35,75%
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	100%	91.66%	100%	100.00	0	100%		27%
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi Sesuai Kebutuhan	100%	99.90%	100%	100.00	0,42	100%		39,7%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Penyelenggaraan Rapat	100%		100%	100.00	0,49	100%		50,5%

					dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD		98.99%											
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	93.93%	100%	93,93	0	100%	92.27	24%					
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Sediakan	100%	93.88	100%	93,88	0	100%	0	31,5%					
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	100%	94.10	100%	94,10	0	100%	0	27,7%					
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah Unit pengadaan peralatan Mesin dan Lainnya yang di Sediakan	100%	0	100%	0%	0	100%	0,0	0,5%					
7	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	100%	0%	100%	0%	0	100%	0	100%					
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	0%	100%			100%	92.27	100%					
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	94.76%	100%	99.95	0,21	100%	99.95	28,7%					
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	100%	99.16%	100%	100.00	0,50	100%	100.00	0%					
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	100%	90.47%	100%	100.00	0,50	100%	100.00	0%					
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	100%	94.15%	100%	99.73	0	100%	99.73	0%					
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	89.44%	100%	87.04	0,50	100%	9,5	48,5%					
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	100%	72.31%	100%	87.04	0	100%	50,0	00%					
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	100%	96.67%	100%	0	0	100%	0,0	00%					
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan	100%	90.06%	100%	99.87	0,40	100%	40,2	40,25%					

					PUBLIK	Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan								
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	88.45%	100%	99.87	0,39	100%	39,8	36,5%
7	01	01	201	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100%		100%	0	0,39	100%	39,8	100%
7	01	01	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	88.45%	100%	99.87	0,42	100%	0	100%
7	01	01	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Di Kecamatan	100%	95.56 %	100%	99.83	0,42	100%	42,7	35,7%
7	01	01	202	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	95.56 %	100%	99.83	0,42	100%	42,7	0%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%		100%	82.10	0,50	100%	50,0	37,5%
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	100%		100%	100.00	0,71	100%	71,2	42,7%
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang Partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan	100%		100%	100.00	0,24	100%	71,2	0%
7	01	03	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%		100%	0				0%
7	01	03	2.02		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%		100%	76.42			25,4	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	100%		100%	76.42			25,4	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	94.79%	100%	100.00	0,50	100%	50,0	39%

7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	94.79 %	100%	100.00	0,50	100%	50,0	39%
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	94.79 %	100%	100.00	0	100%	50,0	0%
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100%	0%	100%	0	0	100%		0%
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	0%	100%	0	0	100%		0%
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	0%	100%	0	0	100%		0%
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	90.22 %	100%	99.98	0,44	100%	44,4	33,7%
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	100%	0%	100%	99.98	0	100%	44,4	0%
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100%	0%	100%	0	0	100%		0%
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	100%	0%	100%	0	0	100%	44,4	0%

7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	90.22 %	100%	99.98	0,44	100%	44,4	41,2%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	88 %	100%	96.81	0,59	100%	59,7	38,1%
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	88. %	100%	96.81		100%	59,7	0%
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	0%	100%	99.48	0,81	100%	81,1	43,5%
7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	100%		100%	0		100%		0%
					Fasilitasi Penerapan peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan				93.27				
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100%	88 %	100%	0		100%	25,0	0%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Cisewu dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur;
- Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian.

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Cisewu meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain : Lingkungan Internal, meliputi :

✚ Kekuatan :

1. Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan;
2. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan;
3. Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan;
4. Adanya sarana dan prasarana.

✚ Kelemahan :

1. Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai;
2. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi Pertikal di wilayah Kecamatan masih lemah;
3. Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi;
4. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan.

1. Lingkungan Eksternal, meliputi :

✚ Peluang :

1. RPJM Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024;
2. Agenda pembangunan tahunan Kabupaten Garut;
3. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah;
4. Komitmen Pemerintah Kabupaten Garut dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik;

5. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan;
6. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas;
7. Adanya Diklat peningkatan kualitas aparatur;
8. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat;
9. Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram.

✚ **Ancaman :**

1. Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai;
2. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah;
3. Egoisme sektoral yang mengganggu koordinasi;
4. Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat;
5. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat;
6. Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cisewu

Provinsi/Kabupaten/Kota Garut

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Nilai SAKIP Kecamatan Cisewu (kategori B)			B (65)	B(70)	BB(71)	BB(75)	BB(80)	A	BB			
2	Jumlah Desa yang memiliki administrasi pemerintahan dengan kriteria baik			2	2	2	2	1	2	2			
3	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelaksanaan 7 (tujuh) unsur pelayanan kecamatan cisewu yang baik			81,50	82,00	82,50	83,00	83,50	82,50	83,00			

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cisewu bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. **Pemanfaatan** peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Garut kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang **kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, Kelembagaan dan Organisasi Massa (Ormas), potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna mencapai tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut.**
2. **Optimalisasi** partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terutama pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, yaitu dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan **Company/Corporate Sosial Responsibility (CSR)**, maka Kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. **Pelayanan Prima.** Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintahan Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara

normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya kepada pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

4. **Peningkatan Kapasitas Aparatur** dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

2.3 Review Terhadap Rencana Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra) yang memuat:

- a) Rancangan kerangka ekonomi tingkat Kecamatan
- b) Peningkatan kualitas Kesehatan, Pendidikan, keagamaan, sosial dan budaya masyarakat kecamatan
- c) Ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan/Pelayanan Publik
- d) Program prioritas pembangunan Tingkat Kecamatan dan.
- e) Rencana kerja Kecamatan.

Pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Cisewu berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD Se-Kabupaten Garut dalam lingkup pelaksanaan program dan kegiatan yang berlokasi di wilayah Cisewu

Dibawah ini kami sampaikan lampiran Tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2023
Kabupaten Garut

NO					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
7					UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	01				KECAMATAN					4,622,545,855	KECAMATAN					4,312,322,800
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3,988,990,055	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec Cisewu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3,762,329,500		
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dok	34,800,100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Cisewu	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan evaluasi kinerja	7 Dok	26,095,900		
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Cisewu	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dok	22,801,300	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Cisewu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	14,097,100		
7	1	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kec Cisewu	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan RKA_SKPD	1 Dok	1,999,800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kec Cisewu	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan RKA_SKPD	1 Dok	1,999,800		
7	1	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kec Cisewu	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan perubahanRKA_SKPD	1 Dok	1,999,800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kec Cisewu	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan perubahanRKA_SKPD	1 Dok	1,999,800		
7	1	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kec Cisewu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Koordinasi Penyusunan DPA SKPD	1 Dok	1,999,800	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kec Cisewu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Koordinasi Penyusunan DPA SKPD	1 Dok	1,999,800		
7	1	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kec Cisewu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1 Dok	1,999,800	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kec Cisewu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1 Dok	1,999,800		
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Kec Cisewu	Jumlah laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan Penyusunan DPA SKPD	1Lap	1,999,800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Kec Cisewu	Jumlah laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan Penyusunan DPA SKPD	1Lap	1,999,800		
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Cisewu	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	1 Lap	1,999,800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Cisewu	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	1 Lap	1,999,800		
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Cisewu	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1,668,213,255	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Cisewu	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1,475,170,000		
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Cisewu	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1,653,301,455	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Cisewu	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1,465,814,200		

7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Cisewu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	14,911,800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Cisewu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	9,355,800	
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec Cisewu	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	32,840,200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec Cisewu	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	32,840,200	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec Cisewu	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17 stel	17,840,200	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec Cisewu	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17 stel	17,840,200	
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec Cisewu	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	15,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec Cisewu	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	15,000,000	
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Cisewu	Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	158,850,800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Cisewu	Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	126,989,700	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Cisewu	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	10 item	10,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Cisewu	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	10 item	10,500,000	
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Cisewu	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	41 jenis	55,363,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Cisewu	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	41 jenis	55,211,800	
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec Cisewu	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	12 Bulan	7,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec Cisewu	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	12 Bulan	7,000,000	
7	01	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec Cisewu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	1364 orang	24,990,100	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec Cisewu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	1364 orang	12,960,200	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Cisewu	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600 OH	60,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Cisewu	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600 OH	40,320,000	
7	1	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec Cisewu	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		997,700	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		997,700	
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Cisewu	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2,037,476,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Cisewu	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2,050,424,000	
7	01	01	2,07	05	Pengadaan peralatan dan mesin	Kec Cisewu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 item	37,476,000	Pengadaan peralatan dan mesin	Kec Cisewu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 item	45,424,000	
7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Cisewu	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	1 unit	2,000,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Cisewu	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	1 unit	2,005,000,000	

7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Cisewu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	38,089,700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Cisewu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	26,089,700	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Cisewu	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	12 bulan	9,300,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Cisewu	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	12 bulan	9,300,000	
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Cisewu	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	3 item	7,790,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Cisewu	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	3 item	7,790,000	
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Cisewu	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	12 Bulan	20,999,700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Cisewu	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	12 Bulan	8,999,700	
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Cisewu	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	18,720,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Cisewu	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	24,720,000	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec Cisewu	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	8 unit	18,720,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec Cisewu	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	8 unit	24,720,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec Cisewu	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	95,244,100	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec Cisewu	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	95,243,700	
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Cisewu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	74,803,900	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Cisewu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	74,803,900	
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Cisewu	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 danPerkembangan Kesejahteraan Masyarakat	8 Kegiatan	74,803,900	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Cisewu	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 danPerkembangan Kesejahteraan Masyarakat	8 Kegiatan	74,803,900	
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec Cisewu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	1 Laporan	20,440,200	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec Cisewu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	1 Laporan	20,439,800	

7	01	02	2,02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec Cisewu	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	4 laporan	20,440,200	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec Cisewu	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	4 laporan	20,439,800
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec Cisewu	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	86,399,900	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec Cisewu	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	72,198,900
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec Cisewu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	56,399,900	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec Cisewu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	42,198,900
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec Cisewu	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	9 Desa	16,400,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec Cisewu	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	8 Desa	14,508,000
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Cisewu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Desa	39,999,900	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Cisewu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Desa	27,690,900
7	1	3	02.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kec Cisewu	Persentase terpenuhinya Transisi Vandemi menuju Endemi Covid - 19	100%	30,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kec Cisewu	Persentase terpenuhinya Transisi Vandemi menuju Endemi Covid -19	9 Desa	30,000,000
7	1	3	02.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kec Cisewu	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	9 Desa	30,000,000	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kec Cisewu	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	9 Desa	30,000,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec Cisewu	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	194,882,400	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec Cisewu	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	186,822,900
7	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec Cisewu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	26,023,800	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec Cisewu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	20,424,300
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec Cisewu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Dok	26,023,800	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec Cisewu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Dok	20,424,300

7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec Cisewu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	168,858,600	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec Cisewu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	166,398,600	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Cisewu	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	12 Kali	118,858,500	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Cisewu	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	12 Kali	116,398,500	
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec Cisewu	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	1 Kegiatan	50,000,100	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec Cisewu	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	1 Kegiatan	50,000,100	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec Cisewu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diimpahkan Kepada Camat	100 %	214,030,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec Cisewu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diimpahkan Kepada Camat	100 %	160,087,600	
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec Cisewu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	214,030,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec Cisewu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	160,087,600	
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec Cisewu	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	1 kali	14,030,200	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec Cisewu	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	1 kali	14,030,200	
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Cisewu	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19	12 Kali	199,999,800	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Cisewu	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19	12 Kali	146,057,400	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec Cisewu	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	42,999,400	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec Cisewu	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	35,640,200	

7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Cisewu	Junlah Laporan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	42,999,400	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Cisewu	Junlah Laporan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	35,640,200	
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Cisewu	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Bulan	15,000,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Cisewu	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Bulan	12,570,000	
7	1	6	02.01	12	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Perundang-undangan Kecamatan Cisewu	Kec Cisewu	Jumlah Fasilitas Penerapan dan Penegakan Perundang-undangan Kecamatan Cisewu	12 Bulan	8,000,200	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Perundang-undangan Kecamatan Cisewu	Kec Cisewu	Jumlah Fasilitas Penerapan dan Penegakan Perundang-undangan Kecamatan Cisewu	12 Bulan	7,811,000	
7	1	6	02.01	13	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Kecamatan Cisewu)	Kec Cisewu	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Kecamatan Cisewu)	12 Bulan	19,999,200	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Kecamatan Cisewu)	Kec Cisewu	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Kecamatan Cisewu)	12 Bulan	15,259,200	
TOTAL									4,622,545,855				4,312,322,800		

2.4 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Cisewu pada Tahun 2023 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan dan pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati kepada Camat dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan di wilayah Desa ;
3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Unsur Forkompimcam, UPTD dan Organisasi/Instansi lainnya yang ada di wilayah Kecamatan.
5. Peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Kelembagaan dan Organisasi massa (Ormas) yang ada di wilayah Kecamatan
6. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar dalam rangka mempermudah akses peningkatan derajat kehidupan masyarakat

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan Kecamatan Cisewu, maka keenam hal tersebut di atas perlu dilaksanakan oleh pengembangan delegasi.

Berdasarkan hasil Musrenbang Tingkat desa dan Tingkat Kecamatan menggambarkan Pembangunan di Kecamatan Cisewu yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2023 dengan berbagai usulan dari masyarakat diantaranya :

- ✚ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Pemerintah.
- ✚ Program Peningkatan sarana dan Prasarana perekonomian.
- ✚ Program Peningkatan kualitas Kesehatan, Pendidikan, keagamaan, sosial dan budaya.

- ✚ Meningkatkan tata kelola wilayah dengan pembangunan insprastruktur yang memadai dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- ✚ Program Peningkatan Sarana dan prasarana pasilitas umum lainnya

Dengan demikian hasil penelaahan terhadap usulan Program dan Kegiatan dari Kecamatan Cisewu telah menjadi rekomendasi Kecamatan untuk diusulkan melalui Musrenbang.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Garut

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Cisewu	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	
	Kegiatan :				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	12 Bulan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen/12 Bulan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Cisewu	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	
	Kegiatan :				
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Pelaksanaan Koordinas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 kegiatan	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	9 Laporan	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Cisewu	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	
	Kegiatan :				
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	9 Desa	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	9 Keegiatan	
	Koordinasi Singkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		Terlaksanannya Penanganan Covid -19 di Tingkat Desa	9 Desa	
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Cisewu	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9 Desa	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 Desa	
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Cisewu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	
	Kegiatan :				
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	9 Desa	
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Cisewu	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	
	Kegiatan :				
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

3.1 Rencana kerja dan pendanaan sebelum dan sesudah perubahan

Rencana Kerja Kecamatan Cisewu Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan 6 program dan 15 Kegiatan dengan jumlah kebutuhan dana sebesar Rp 4.662.545.855 dan Rencana Kerja Perubahan tahun 2023 Sebesar Rp. 4,312,322,800 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut dengan rincian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			
a.			
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	=	Rp 3,762,329,500	
1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah			
• Target Keuangan	=	Rp. 14,097,100	100%
• Capaian Program	=	Persentase pemenuhan urusan penunjang pemerintahan di tingkat kecamatan	100%
• Output/Keluaran	=	Capaian pemenuhan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja	
• Outcome/Hasil	=	Meningkatnya pelayanan dan Presentase ASN yang memiliki prestasi kerja yang baik.	
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD			
• Target Keuangan	=	1,999,800	
• Capaian Program	=	Persentase pemenuhan urusan penunjang pemerintahan di tingkat kecamatan	
• Output/Keluaran	=	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	
• Outcome/Hasil	=	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD			
• Target Keuangan	=	1,999,800	
• Capaian Program	=	Persentase pemenuhan urusan penunjang pemerintahan di tingkat kecamatan	
• Output/Keluaran	=	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
• Outcome/Hasil	=	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	

		Perubahan RKA-SKPD	
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD			
• Target Keuangan	=	1,999,800	
• Capaian Program	=	Persentase pemenuhan urusan penunjang pemerintahan di tingkat kecamatan	
• Output/Keluaran	=	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	
• Outcome/Hasil	=	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD			
• Target Keuangan	=	1,999,800	
• Capaian Program	=	Persentase pemenuhan urusan penunjang pemerintahan di tingkat kecamatan	
• Output/Keluaran	=	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
• Outcome/Hasil	=	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD			
• Target Keuangan	=	1,999,800	
• Capaian Program	=	Persentase pemenuhan urusan penunjang pemerintahan di tingkat kecamatan	
• Output/Keluaran	=	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
• Outcome/Hasil	=	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
• Target Keuangan	=	1,999,800	
• Capaian Program	=	Persentase pemenuhan urusan penunjang pemerintahan di tingkat kecamatan	
• Output/Keluaran	=	Jumlah Laporan Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	
• Outcome/Hasil	=	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah	
b. Administrasi keuangan perangkat daerah			
- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN			
• Target Keuangan	=	Rp. 1,465,814,200	

• Capaian Program	=	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	
• Output/Keluaran	=	Capaian pemenuhan dokumen administrasi keuangan	
• Outcome/Hasil	=	Meningkatnya pelayanan dan Presentase ASN yang memiliki prestasi kerja yang baik	
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD			
• Target Keuangan	=	Rp. 9,355,800	
• Capaian Program	=	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	
• Output/Keluaran	=	Capaian pemenuhan dokumen administrasi keuangan	
• Outcome/Hasil	=	Meningkatnya pelayanan dan Presentase ASN yang memiliki prestasi kerja yang baik	
c. Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah			
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			
• Target Keuangan	=	Rp. 17.840.200;	100%
• Capaian Program	=	Jumlah pakaian dinas yang memadai	100%
• Output/Keluaran	=	Capaian pemenuhan laporan administasi kepegawaian	
• Outcome/Hasil	=	Meningkatnya pelayanan dan Presentase ASN yang memiliki prestasi kerja yang baik	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
• Target Keuangan	=	Rp. 15.000.000	
• Capaian Program	=	Capaian pemenuhan laporan Pendidikan dan pelatihan Berdasarkan tugas dan Fungsi	
• Output/Keluaran	=	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarakan tugas dan Fungsi	
• Outcome/Hasil	=	Meningkatnya pelayanan dan Presentase ASN yang memiliki prestasi kerja yang baik	
d. Adminstrasi Umum Perangkat Daerah			
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			

• Target Keuangan	=	Rp. 10,500,000	100%
• Capaian Program	=	Lancarnya pemerintahan kecamatan	100%
• Output/Keluaran	=	Capaian pemenuhan laporan administrasi umum perangkat daerah	
• Outcome/Hasil	=	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			
• Target Keuangan	=	Rp. 55.211.800;	100%
• Capaian Program	=	Capaian pemenuhan laporan administrasi umum perangkat daerah	100%
• Output/Keluaran	=	Tersedianya alat tulis kantor kecamatan	
• Outcome/Hasil	=	Capaian pemenuhan laporan administrasi umum perangkat daerah	
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;			
• Target Keuangan	=	Rp. 7.000.000;	100%
• Capaian Program	=	Capaian pemenuhan laporan administrasi umum perangkat daerah	100%
• Output/Keluaran	=	Tersedianya cetak dan penggandaan	
• Outcome/Hasil	=	- Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan - Persentase ASN yang memiliki kinerja baik	
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			
• Target Keuangan	=	Rp. 0	
• Capaian Program	=	Capaian pemenuhan laporan administrasi umum perangkat daerah	
• Output/Keluaran	=	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	
• Outcome/Hasil	=	- Terselenggaranya rapat yang optimal - Prosentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik	
- Fasilitasi kunjungan tamu			
• Target Keuangan	=	Rp. 12.960.200;	
• Capaian Program	=	Capaian pemenuhan laporan administrasi	

		umum perangkat daerah
• Output/Keluaran	=	Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat-rapat
• Outcome/Hasil	=	- Terselenggaranya rapat yang optimal - Prosentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		
• Target Keuangan	=	Rp. 40.320.000;
• Capaian Program	=	Capaian pemenuhan laporan administrasi umum perangkat daerah
• Output/Keluaran	=	koordinasi dan pembinaan Dalam Daerah
• Outcome/Hasil	=	- Meningkatnya koordinasi lintas sektoral dengan dinas dan desa - Prosentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
• Target Keuangan	=	Rp. 997,700
• Capaian Program	=	Capaian Penatausahaan Pengarsipan Kecamatan
• Output/Keluaran	=	Terlaksanannya penatausahaan pengarsipan Kecamatan
• Outcome/Hasil	=	- Meningkatnya penatausahaan Kearsipan kecamatan
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
- Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya		
• Target Keuangan	=	Rp. 45,424,000
• Capaian Program	=	Terpabilitasnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
• Output/Keluaran	=	- Jumlah Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya
• Outcome/Hasil	=	- Capaian pemenuhan pengadaan barang
- Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya		
• Target Keuangan	=	Rp. 2,005,000,000;
• Capaian Program	=	Terpabilitasnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah

		daerah	
• Output/Keluaran	=	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
• Outcome/Hasil	=	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			
• Target Keuangan	=	Rp. 9,300,000	100%
• Capaian Program	=	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
• Output/Keluaran	=	Tersedianya listrik / penerangan bangunan kantor;	
• Outcome/Hasil	=	- Terpenuhinya penerangan gedung kantor kecamatan - Prosentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik	
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
• Target Keuangan	=	Rp 7,790,000	
• Capaian Program	=	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	
• Output/Keluaran	=	- Jumlah item peralatan dan perlengkapankantor	
• Outcome/Hasil	=	- Kelancaran tugas aparatur - Prosentase ASN yang berkinerja baik	
• Capaian Program	=	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	
Penyediaan jasa pelayanan umum			
• Target Keuangan	=	Rp. 8,999,700	100%
• Capaian Program	=	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
• Output/Keluaran	=	Jumlah jasa pemeliharaan kantor	
• Outcome/Hasil	=	- Terselenggaranya rapat yang optimal - Prosentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik	
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
- Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya			
• Target Keuangan	=	Rp. 0	0%

• Capaian Program	=	Capaian pemenuhan laporan pemeliharaan barang milik daerah	0%
• Output/Keluaran	=	Tersedianya pemeliharaan Gedung Kantor yang direhabilitasi sedang/berat	
• Outcome/Hasil	=	- Terciptanya kantor kecamatan yang lebih baik - Prosentase ASN yang berkinerja baik	
- Penyediaan jasa pemeliharaan biaya, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan			
• Target Keuangan	=	Rp. 24,720,000	
• Capaian Program	=	Capaian pemenuhan laporan pemeliharaan barang milik daerah	
• Output/Keluaran	=	- Jumlah pembayaran STNK servis kendaraan yang memadai -	
• Outcome/Hasil	=	- Kelancaran tugas aparatur - Prosentase ASN yang berkinerja baik	
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp 95,243,700,	
a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
- Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			
• Target Keuangan	=	Rp 74,803,900	100%
• Capaian Program	=	Pemenuhan laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	
• Output/Keluaran	=	Jumlah laporan	
• Outcome/Hasil	=	Prosentase ASN yang berkinerja baik	
b. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang Tidak di Laksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
- Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan			
• Target Keuangan	=	Rp. 20,439,800;	100%
• Capaian Program	=	Pemenuhan laporan penyelenggaraan PATEN	
• Output/Keluaran	=	Jumlah sarana dan prasarana memadai	
• Outcome/Hasil	=	Prosentase ASN yang berkinerja baik	

•		
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp 72,198,900
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
• Target Keuangan	=	Rp. 42,198,900
• Capaian Program	=	Jumlah Desa yang berkinerja Baik
• Output/Keluaran	=	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa
• Outcome/Hasil	=	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
• Target Keuangan	=	Rp. 30,000,000
• Capaian Program	=	Jumlah Desa yang berkinerja Baik
• Output/Keluaran	=	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
• Outcome/Hasil	=	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp 186,822,900
a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
• Target Keuangan	=	Rp. 166,398,600
• Capaian Program	=	Pemenuhan laporan gangguan trantib
• Output/Keluaran	=	Jumlah pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum
• Outcome/Hasil	=	Terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum
b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
• Target Keuangan	=	Rp. 20,424,300;
• Capaian Program	=	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tingkat kecamatan
• Output/Keluaran	=	Jumlah penyelenggaraan ketertaman dan ketertiban umum
• Outcome/Hasil	=	Terlaksananya penyelenggaraan ketertaman dan ketertiban umum

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN		Rp 160,087,600;
6. PEMERINTAHAN UMUM		
a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
• Target Keuangan	=	Rp. 160,087,600;
• Capaian Program	=	Pemenuhan laporan pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
• Output/Keluaran	=	Jumlah pelaksanaan kegiatan Forkofimcam.
1. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp.35,640,200;
a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah		
• Target Keuangan	=	Rp. 35.640.200;
• Capaian Program	=	Pemenuhan laporan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintah desa
• Output/Keluaran	=	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Untuk lebih jelasnya Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 dan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan serta pendanaan Tahun 2023 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rencana Perubahan Anggaran Tahun 2023

Kabupaten Garut

SEBELUM PERUBAHAN							SETELAH PERUBAHAN						CATATAN PENTING
NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KABUPATEN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KABUPATEN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	KECAMATAN CISEWU			4,622,545,855			KECAMATAN CISEWU			4,312,322,800			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	3,988,990,055	Kecamatan Cisewu	DAU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	3,762,329,500	Kecamatan Cisewu	DAU	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	34,800,100	Kecamatan Cisewu	DAU	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	7 Dokumen	26,095,900	Kecamatan Cisewu	DAU	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	1 Dokumen	22,801,300	Kecamatan Cisewu	DAU	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	1 Dokumen	14,097,100	Kecamatan Cisewu	DAU	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1,999,800	Kecamatan Cisewu	DAU	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1,999,800	Kecamatan Cisewu	DAU	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1,999,800	Kecamatan Cisewu	DAU	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1,999,800	Kecamatan Cisewu	DAU	

	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1 Dokumen	1,999,800	Kecamatan Cisewu	DAU	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1 Dokumen	1,999,800	Kecamatan Cisewu	DAU	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1,999,800	Kecamatan Cisewu	DAU	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1,999,800	Kecamatan Cisewu	DAU	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	1 Dokumen	1,999,800	Kecamatan Cisewu	DAU	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	1 Dokumen	1,999,800	Kecamatan Cisewu	DAU	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,999,800	Kecamatan Cisewu	DAU	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,999,800	Kecamatan Cisewu	DAU	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,999,800	Kecamatan Cisewu	DAU	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,999,800	Kecamatan Cisewu	DAU	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1,668,213,255	Kecamatan Cisewu	DAU	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1,475,170,000	Kecamatan Cisewu	DAU	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1,653,301,455	Kecamatan Cisewu	DAU	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1,465,814,200	Kecamatan Cisewu	DAU	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	14,911,800	Kecamatan Cisewu	DAU	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9,355,800	Kecamatan Cisewu	DAU	

1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	32,840,200	Kecamatan Cisewu	DAU	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	32,840,200	Kecamatan Cisewu	DAU
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Memadai	68 Stel	17,840,200	Kecamatan Cisewu	DAU	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Memadai	68 Stel	17,840,200	Kecamatan Cisewu	DAU
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kecamatan Cisewu)	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Orang	15,000,000	Kecamatan Cisewu	DAU	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kecamatan Cisewu)	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Orang	15,000,000	Kecamatan Cisewu	DAU
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	158,850,800	Kecamatan Cisewu	DAU	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	126,989,700	Kecamatan Cisewu	DAU
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penerangan gedung kantor yang memadai	11 item	10,500,000	Kecamatan Cisewu	DAU	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penerangan gedung kantor yang memadai	11 item	10,500,000	Kecamatan Cisewu	DAU
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis kantor (ATK) sesuai dengan kebutuhan	32 Jenis	55,363,000	Kecamatan Cisewu	DAU	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis kantor (ATK) sesuai dengan kebutuhan	32 Jenis	55,211,800	Kecamatan Cisewu	DAU

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	7 Jenis 10.000 Lbr	7,000,000	Kecamatan Cisewu	DAU	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	7 Jenis 10.000 Lbr	7,000,000	Kecamatan Cisewu	DAU
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kegiatan rapat- rapat kecamatan	600 orang	24,990,100	Kecamatan Cisewu	DAU	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kegiatan rapat- rapat kecamatan	500 orang	12,960,200	Kecamatan Cisewu	DAU
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dengan instansi terkait serta desa	536 OH	60,000,000	Kecamatan Cisewu	DAU	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dengan instansi terkait serta desa	536 OH	40,320,000	Kecamatan Cisewu	DAU
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 kegiatan	997,700	Kecamatan Cisewu	DAU	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Kegiatan	997,700	Kecamatan Cisewu	DAU
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2,037,476,000	Kecamatan Cisewu	DAU	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2,050,424,000	Kecamatan Cisewu	DAU
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	37,476,000	Kecamatan Cisewu	DAU	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	45,424,000	Kecamatan Cisewu	DAU
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	2,000,000,000	Kecamatan Cisewu	DAU	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	2,005,000,000	Kecamatan Cisewu	DAU

1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	38,089,700	Kecamatan Cisewu	DAU	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	26,089,700	Kecamatan Cisewu	DAU
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan internet	12 Bulan	9,300,000	Kecamatan Cisewu	DAU	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan internet	12 Bulan	9,300,000	Kecamatan Cisewu	DAU
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	8 item	7,790,000	Kecamatan Cisewu	DAU	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	8 item	7,790,000	Kecamatan Cisewu	DAU
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan kantor	12 Bulan	20,999,700	Kecamatan Cisewu	DAU	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan kantor	12 Bulan	8,999,700	Kecamatan Cisewu	DAU
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	18,720,000	Kecamatan Cisewu	DAU	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	24,720,000	Kecamatan Cisewu	DAU
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan dinas/Operasional yang memadai	10 item	18,720,000	Kecamatan Cisewu	DAU	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan dinas/Operasional yang memadai	10 item	24,720,000	Kecamatan Cisewu	DAU

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan	100%	95,244,100	Kecamatan Cisewu	DAU	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan	100%	95,243,700	Kecamatan Cisewu	DAU
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	74,803,900	Kecamatan Cisewu	DAU	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	74,803,900	Kecamatan Cisewu	DAU
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	74,803,900	Kecamatan Cisewu	DAU	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	74,803,900	Kecamatan Cisewu	DAU
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Laporan	20,440,200	Kecamatan Cisewu	DAU	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Laporan	20,439,800	Kecamatan Cisewu	DAU

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	1 laporan	20,440,200	Kecamatan Cisewu	DAU	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah sarana prasarana PATEN yang memadai	1 Laporan	20,439,800	Kecamatan Cisewu	DAU
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100%	86,399,900	Kecamatan Cisewu	DAU	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100%	72,198,900	Kecamatan Cisewu	DAU
3.1	Koordinasi Kegiatan Masyarakat dan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Masyarakat dan Desa	1 Kegiatan	56,399,900	Kecamatan Cisewu	DAU	Koordinasi Kegiatan Masyarakat dan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Masyarakat dan Desa	1 Kegiatan	42,198,900	Kecamatan Cisewu	DAU
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah pelaksanaan Kegiatan RPTK	1 Kegiatan	16,400,000	Kecamatan Cisewu	DAU	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah pelaksanaan Kegiatan RPTK	1 Kegiatan	14,508,000	Kecamatan Cisewu	DAU

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	39,999,900	Kecamatan Cisewu	DAU	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	27,690,900	Kecamatan Cisewu	DAU
3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase terpenuhinya transisi pandemi menuju endemi Covid -19	1 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Cisewu	DAU	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase terpenuhinya transisi pandemi menuju endemi Covid -19	1 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Cisewu	DAU
	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	9 Keg/Desa	30,000,000	Kecamatan Cisewu	DAU	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan TP. PKK Tingkat Kecamatan	9 Desa/ Kegiatan	30,000,0000	Kecamatan Cisewu	DAU
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tingkat kecamatan	100%	194,882,400	Kecamatan Cisewu	DAU	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tingkat kecamatan	100%	186,822,900	Kecamatan Cisewu	DAU
4.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	26,023,800	Kecamatan Cisewu	DAU	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	20,424,300	Kecamatan Cisewu	DAU

	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Kegiatan	26,023,800	Kecamatan Cisewu	DAU	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Kegiatan	20,424,300	Kecamatan Cisewu	DAU	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	168,858,600	Kecamatan Cisewu	DAU	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	166,398,600	Kecamatan Cisewu	DAU	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	118,858,500	Kecamatan Cisewu	DAU	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	116,398,500	Kecamatan Cisewu	DAU	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	1 Kegiatan	50,000,100	Kecamatan Cisewu	DAU	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	1 Kegiatan	50,000,100	Kecamatan Cisewu	DAU	

5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tingkat kecamatan	100 Persen	214,030,000	Kecamatan Cisewu	DAU	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tingkat kecamatan	100%	160,087,600	Kecamatan Cisewu	DAU
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	2 Dokumen	214,030,000	Kecamatan Cisewu	DAU	Fasilitasi dan koordinasi dan pembinaan	2 Dokumen		160,087,600	Kecamatan Cisewu	DAU
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggalika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggalika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	12 bulan	14,030,200	Kecamatan Cisewu	DAU	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggalika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggalika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	12 bulan	14,030,200	Kecamatan Cisewu	DAU
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Cisewu)	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Cisewu)	12 bulan	199,999,800	Kecamatan Cisewu	DAU	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Cisewu)	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 bulan	146,057,400	Kecamatan Cisewu	DAU

6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase penyelenggaraan tugas Pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa	100%	42,999,400	Kecamatan Cisewu	DAU	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase penyelenggaraan tugas Pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa	100%	35,640,200	Kecamatan Cisewu	DAU
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Dokumen	42,999,400	Kecamatan Cisewu	DAU	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Dokumen	35,640,200	Kecamatan Cisewu	DAU
	Fasilitasi, Administrasi Tat Pemerintahan Desa	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Administrasi Tat Pemerintahan Desa	1 Laporan	15,000,000	Kecamatan Cisewu	DAU	Fasilitasi, Administrasi Tat Pemerintahan Desa	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Administrasi Tat Pemerintahan Desa	3 Kegiatan	12,570,000	Kecamatan Cisewu	DAU
	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Desa berkinerja Baik	9 Desa	8,000,200	Kecamatan Cisewu	DAU	Fasilitasi Administrasi Desa	Persentase Desa berkinerja Baik	9 Desa	7,811,000	Kecamatan Cisewu	DAU
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Kecamatan)	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Kecamatan)	2 Kegiatan	19,999,200	Kecamatan Cisewu	DAU	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Kecamatan)	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Kecamatan)	2 Kegiatan	15,259,200	Kecamatan Cisewu	DAU
				4,622,545,855						4,312,322,800		

Tabel 4.1
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2023

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Catatan Penting
		Pagu Indikatif		Capaian (%)	Sumber Dana	Pagu Indikatif		
		Sebelum	Realisasi			Sesudah	Capaian (%)	
UNSUR KEWILAYAHAN		4,622,545,855	1,062,899,902	22,9%		4,312,322,800	23,64	
KECAMATAN						4,312,322,800		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	3,988,990,055	790,426,202	19,8%	DAU	3,762,329,500	20,01%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan evaluasi kinerja	34,800,100	12,784,100	36,7%	DAU	32,892,300	38,9%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22,801,300	7,296,000	31,9%		14,097,100	34,9%	Efisiensi anggaran
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan RKA_SKPD	1,999,800	1,987,800	99,3%		1,999,800	99,4%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan perubahan RKA_SKPD	1,999,800	0	0		1,999,800	0	
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Koordinasi Penyusunan DPA SKPD	1,999,800	1,690,000	84,5%		1,999,800	84,5%	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1,999,800	0			1,999,800	0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan Penyusunan DPA SKPD	1,999,800	0			1,999,800	0	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	1,999,800	1,810,300	90,5%		1,999,800	90,5%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,668,213,255	676,285,702	40,5%	DAU	1,475,170,000	40,7	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1,653,301,455	670,443,802	40,5%		1,465,814,200	40,6	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	14,911,800	5,841,900	39,1%		9,355,800	62,4	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32,840,200	11,693,200	35,5%		32,840,200	35,6	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17,840,200	11,693,200	35,6%		17,840,200	35,6	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15,000,000	-	0		15,000,000	0,0	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	158,850,800	66,053,200	41,5%		126,989,700	52,0	Efisiensi anggaran
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	10,500,000	5,887,000	56,0%		10,500,000	56,1	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	55,363,000	27,678,500	49,9%		55,211,800	50,0	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan	7,000,000	3,500,000	50%		7,000,000	50,0	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	24,990,100	6,940,000	27%		12,960,200	53,5	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60,000,000	21,050,000	35%		40,320,000	52,2	Efisiensi anggaran

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	997,700	997,700	100%		997,700	100.0	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,037,476,000	0	0		2,050,424,000	0	
Pengadaan peralatan dan mesin	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	37,476,000	0	0%		45,424,000	0%	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	2,000,000,000	0	0%		2,005,000,000	0%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38,089,700	12,269,800	32.2%		26,089,700	32.2	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	9,300,000	3,875,000	41.7%		9,300,000	41.7	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	7,790,000	3,895,000	50.0%		7,790,000	50.0	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	20,999,700	4,499,800	21.4%		8,999,700	21.4	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18,720,000	11,350,200	60.6%		24,720,000	60.6	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	18,720,000	11,350,200	60.6%		24,720,000	60.6	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	95,244,100	1,614,000	1.69%		95,243,700	1.69	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	74,803,900		0		74,803,900	0	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 danPerkembangan Kesejahteraan Masyarakat	74,803,900		0		74,803,900	0	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	20,440,200	1,614,000	7.9%		20,439,800	7.9	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	PATEN, jenis dan jumlah pelayanan yang dilaksanakan dikecamatan	20,440,200	1,614,000	7.9%		20,439,800	7.9	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	86,399,900	55,836,200	64.6%		72,198,900	77.3	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	56,399,900	27,037,200	47.9%		42,198,900	64,21	Efisiensi anggaran
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	16,400,000	12,944,000	78.9%		14,508,000	89.2	Efisiensi anggaran
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		39,999,900	14,093,200	35%		27,690,900	50,9	Efisiensi anggaran
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		30,000,000	28,799,000	96.0		30,000,000	96.0	

Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		30,000,000	28,799,000	96.0		30,000,000	96.0	
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	194,882,400	119,851,950	61,4%		186,822,900	64.2	Efisiensi anggaran
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	26,023,800	11,704,100	44,9%		20,424,300	57.3	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	26,023,800	11,704,100	44,9%		20,424,300	57.3	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	168,858,600	108,147,850	64,0%		166,398,600	65.0	Efisiensi anggaran
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	118,858,500	58,150,250	48,9%		116,398,500	50.0	Efisiensi anggaran
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	50,000,100	49,997,600	99,9%		50,000,100	99,9%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	214,030,000	70,841,550	33,9%		160,087,600	44.3	Efisiensi anggaran
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	214,030,000	70,841,550	33,9%		160,087,600	44.3	Efisiensi anggaran
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	14,030,200	3,000,000	21,3%		14,030,200	21.4	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19	199,999,800	67,841,550	33,9%		146,057,400	46.4	Efisiensi anggaran
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	42,999,400	24,330,000	56,5%		35,640,200	68.3	Efisiensi anggaran
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42,999,400	24,330,000	56,5%		35,640,200	68.3	Efisiensi anggaran
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15,000,000	6,498,000	43,2%		12,570,000	51.7	Efisiensi anggaran
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan-undangan Kecamatan Cisewu	Jumlah Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan-undangan Kecamatan Cisewu	8,000,200	3,658,800	45,7%		7,811,000	46.8	Efisiensi anggaran
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Kecamatan Cisewu)	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Kecamatan Cisewu)	19,999,200	14.173.200	70,8%		15,259,200	92.9	Efisiensi anggaran
Jumlah		4,622,545,855	1,062,899,902	22,9%		4,312,322,800	23,64%	

Sumber Data : Pengolahan Data Kecamatan Cisewu tahun 2023

Realisasi Program, Kegiatan merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program RPJMD dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil realisasi sampai Triwulan II Tahun 2023 dari pagu anggaran Rp 4,499,810,155 realiasi sebesar Rp 1,062,899,902 atau (23,64%). Selanjutnya Rumusan Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Cisewu dan Perkiraan Maju Tahun 2023 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

TABEL TC-33
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
			TARGET CAPAIA N KINERJ A	KABUPATEN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	
2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	18
7	KEWILAYAHAN									
7.01.	KECAMATAN									
7.01.0.00.0.00.14.00.	KECAMATAN CISEWU			4,312,322,800					4,743,555,080	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	3,762,329,500	Kecamatan Cisewu	DAU		100%	4,138,562,450	Kecamatan Cisewu
07.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100%	26,095,900	Kecamatan Cisewu	DAU		100%	28,705,490	Kecamatan Cisewu
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	7 Dokumen	14,097,100	Kecamatan Cisewu	DAU		5 Dokumen	15,506,810	Kecamatan Cisewu
7.01.7.01.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Laporan	1,999,800	Kecamatan Cisewu	DAU		1 Laporan	2,199,780	Kecamatan Cisewu
7.01.7.01.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Laporan	1,999,800	Kecamatan Cisewu	DAU		1 Laporan	2,199,780	Kecamatan Cisewu
7.01.7.01.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1 Laporan	1,999,800	Kecamatan Cisewu	DAU		1 Laporan	2,199,780	Kecamatan Cisewu

7.01.7.01.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1 Laporan	1,999,800	Kecamatan Cisewu	DAU		1 Laporan	2,199,780	Kecamatan Cisewu
7.01.7.01.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1,999,800	Kecamatan Cisewu	DAU		1 Laporan	2,199,780	Kecamatan Cisewu
7.01.7.01.15.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1,999,800	Kecamatan Cisewu	DAU		4 Laporan	2,199,780	Kecamatan Cisewu
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1,475,170,000	Kecamatan Cisewu	DAU		100%	1,622,687,000	Kecamatan Cisewu
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1,465,814,200	Kecamatan Cisewu	DAU		12 Bulan	1,612,395,620	Kecamatan Cisewu
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9,355,800	Kecamatan Cisewu	DAU		1 Laporan	10,291,380	Kecamatan Cisewu
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	32,840,200	Kecamatan Cisewu	DAU		100%	36,124,220	Kecamatan Cisewu
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Memadai	17 Stel	17,840,200	Kecamatan Cisewu	DAU		17 Stel	19,624,220	Kecamatan Cisewu
7.01.01.2.05.02.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	15,000,000	Kecamatan Cisewu	DAU		3 orang	16,500,000	Kecamatan Cisewu
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	126,989,700	Kecamatan Cisewu	DAU		100%	139,688,670	Kecamatan Cisewu
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penerangan gedung kantor yang memadai	11 item	10,500,000	Kecamatan Cisewu	DAU		11 item	11,550,000	Kecamatan Cisewu

7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis kantor (ATK) sesuai dengan kebutuhan	32 Jenis	55,211,800	Kecamatan Cisewu	DAU		32 Jenis	60,732,980	Kecamatan Cisewu
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	7 Jenis	7,000,000	Kecamatan Cisewu	DAU		7 Jenis	7,700,000	Kecamatan Cisewu
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kegiatan rapat- rapat kecamatan	1350 orang	12,960,200	Kecamatan Cisewu	DAU		1364 orang	14,256,220	Kecamatan Cisewu
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dengan instansi terkait serta desa	520 OH	40,320,000	Kecamatan Cisewu	DAU		536 OH	44,352,000	Kecamatan Cisewu
7.01.7.01.15.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsif Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsif Dinamis pada SKPD	1 dokumen	997,700	Kecamatan Cisewu	DAU		1 dokumen	1,097,470	Kecamatan Cisewu
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2,050,424,000	Kecamatan Cisewu	DAU		100%	2,255,466,400	Kecamatan Cisewu
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		45,424,000	Kecamatan Cisewu	DAU			49,966,400	Kecamatan Cisewu
7.01.01.2.07.06	Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan	1 Paket	2,005,000,000	Kecamatan Cisewu	DAU		1 Paket	2,205,500,000	Kecamatan Cisewu
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	26,089,700	Kecamatan Cisewu	DAU		100%	28,698,670	Kecamatan Cisewu
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan internet	12 Bulan	9,300,000	Kecamatan Cisewu	DAU		12 Bulan	10,230,000	Kecamatan Cisewu

7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	8 item	7,790,000	Kecamatan Cisewu	DAU		8 item	8,569,000	Kecamatan Cisewu
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan kantor	12 Bulan	8,999,700	Kecamatan Cisewu	DAU		12 Bulan	9,899,670	Kecamatan Cisewu
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	24,720,000	Kecamatan Cisewu	DAU		100%	27,192,000	Kecamatan Cisewu
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan dinas/Operasional yang memadai	10 item	24,720,000	Kecamatan Cisewu	DAU		10 item	27,192,000	Kecamatan Cisewu
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan	100%	95,243,700	Kecamatan Cisewu	DAU		100%	104,768,070	Kecamatan Cisewu
07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	74,803,900	Kecamatan Cisewu	DAU		1 Laporan	82,284,290	Kecamatan Cisewu
07.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Fasilitasi	1 Laporan	74,803,900	Kecamatan Cisewu	DAU		1 Laporan	82,284,290	Kecamatan Cisewu

		penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan								
07.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Laporan	20,440,200	Kecamatan Cisewu	DAU		1 Laporan	22,484,220	Kecamatan Cisewu
07.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	1 Laporan	20,440,200	Kecamatan Cisewu	DAU		1 Laporan	22,484,220	Kecamatan Cisewu
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100%	72,198,900	Kecamatan Cisewu	DAU	72,198,900	100%	79,418,790	Kecamatan Cisewu
07.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	42,198,900	Kecamatan Cisewu	DAU	42,198,900	2 Laporan	46,418,790	Kecamatan Cisewu
07.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase MasyarakatbDesa dan Kelurahan yang dapat di berdayakan	2 Kegiatan	14,508,000	Kecamatan Cisewu	DAU	14,508,000	2 Kegiatan	15,958,800	Kecamatan Cisewu

07.01.03.2.01.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	9 Desa	27,690,900	Kecamatan Cisewu	DAU	27,690,900	9 Desa	30,459,990	Kecamatan Cisewu
07.01.03.2.03	Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)	Jumlah laporan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM)	2 Laporan	30,000,000	Kecamatan Cisewu	DAU	30,000,000	2 Laporan	33,000,000	Kecamatan Cisewu
07.01.03.2.03.02	PENANGANAN COVID-19 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Penanganan Covid -19 Tingkat Desa	4 Kegiatan	30,000,000	Kecamatan Cisewu	DAU	30,000,000	4 Kegiatan	33,000,000	Kecamatan Cisewu
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tingkat kecamatan	100%	186,822,900	Kecamatan Cisewu	DAU		100%	205,505,190	Kecamatan Cisewu
7.01.7.01.15.04.2.02.01	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Kegiatan	20,424,300	Kecamatan Cisewu	DAU		1 Kegiatan	22,466,730	Kecamatan Cisewu
7.01.7.01.15.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	1 Kegiatan	20,424,300	Kecamatan Cisewu	DAU		DAU	22,466,730	Kecamatan Cisewu

07.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Laporan	166,398,600	Kecamatan Cisewu	DAU		4 Laporan	183,038,460	Kecamatan Cisewu
07.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 Kegiatan	116,398,600	Kecamatan Cisewu	DAU		1 Kegiatan	128,038,460	Kecamatan Cisewu
7.01.7.01.15.04.7.03.02..	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	1 Kegiatan	50,000,100	Kecamatan Cisewu	DAU		1 Kegiatan	55,000,110	Kecamatan Cisewu
7.01.05.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 Persen	160,087,600	Kecamatan Cisewu	DAU		100 Persen	176,096,360	Kecamatan Cisewu
7.01.05.2.01.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Dokumen	160,087,600	Kecamatan Cisewu	DAU		1 Dokumen	176,096,360	
7.01.05.2.01.02	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Dokumen	14,030,200	Kecamatan Cisewu	DAU		Dokumen	15,433,220	Kecamatan Cisewu
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan	12 Kegiatan	146,057,400	Kecamatan Cisewu	DAU		12 Kegiatan	160,663,140	Kecamatan Cisewu

07.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tingkat kecamatan	100%	35,640,200	Kecamatan Cisewu	DAU		100%	39,204,220	Kecamatan Cisewu
07.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Dokumen	35,640,200	Kecamatan Cisewu	DAU		1 Dokumen	39,204,220	Kecamatan Cisewu
01.01.06.2.01.02		Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Persentase desa berkinerja baik	9 Desa	12,570,000	Kecamatan Cisewu	DAU		9 Desa	13,827,000	Kecamatan Cisewu
07.01.06.2.01.04		Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	1 Kegiatan	7,811,000	Kecamatan Cisewu	DAU		1 Kegiatan	8,592,100	Kecamatan Cisewu
7.01.7.01.15.06.2.01 .06.		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan	1 Kegiatan	15,259,200	Kecamatan Cisewu	DAU		1 Kegiatan	16,785,120	Kecamatan Cisewu

BAB IV

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Cisewu dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam visi Kabupaten Garut.

Perencanaan ini dibuat secara partisipasi, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *Stakeholder* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Cisewu. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Cisewu ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta Visi dan Misi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan Implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 atau Tahun kedua, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut;

1. Penetapan Status Hukum naskah perencanaan ini, sehingga Implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan.
2. Sosialisasi Rencana Kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan Implementasi Renstra serta untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja yang sudah dibuat.
3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *Stakeholder* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktivitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari Rencana Kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan Sosialisasi Renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan kearah yang sama sesuai dengan Rencana Strategis yang dibuat.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan tempat yang telah ditetapkan di Rencana Kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja yang telah dibuat.
5. Monitoring dan Evaluasi serta Pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dilakukan terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja dalam rangka menjamin pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Garut.

Dengan mengharap keridhoan Allah Yang Maha Kuasa, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat ini dapat diwujudkan, sehingga tujuan akhir untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Amin.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN